

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan partai politik sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan dan melakukan fungsi pengawasan serta pengontrolan terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Fungsi pengawasan dan pengontrolan serta partisipasi politik dari masyarakat tidak hanya ditunjukkan lewat Pemilihan Umum, tetapi rakyat perlu memiliki sumber daya politik atau kemampuan berpartisipasi dalam proses politik sehingga hak-haknya bisa terlindungi dan terpenuhi.

Partai politik awalnya lahir di negara-negara Eropa barat. Pada abad ke 20, ketika terjadi revolusi untuk menentang keotoriteran para raja yang berkuasa waktu itu dan mulailah kehidupan partai politik menyebar keseluruh pelosok dunia. Meskipun demikian meluasnya perkembangan partai politik tersebut, hingga dikenal suatu ilmu mengenai partai politik yaitu “stasiologi” belum ada teori yang tersusun dengan mantap sebagai lembaga politik dalam suatu negara yang diharapkan mampu menyelesaikan setiap kesenjangan antara yang idealnya dengan realita yang ada. Kehidupan partai politik di Indonesia dikenal semenjak adanya Maklumat X Wakil Presiden tahun 1955 yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh partai politik. Maklumat ini

bercirikan adanya penyimpangan terhadap UUD 1945 awalnya yaitu dalam pengakuannya menganut sistem pemerintahan Presidensial, pada prakteknya berlaku sistem Parlemerter.

Dengan sendirinya partai politik berkembang pesat dewasa ini hingga terjadi persaingan berat dalam dalam tubuh partai politik. Awalnya partai politik dikenal hanya sekelompok masyarakat yang terorganisir yang memiliki nilai dan tujuan yang sama, sekarang dikenal partai politik merupakan demokrasi modern artinya adanya kebebasan dalam pemerintahan dan juga adanya perwakilan. Banyak ahli politik mengatakan partai politiklah yang menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*".

Demokrasi merupakan pemeritahan yang ditata sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*), dan suara mayoritas dari rakyat (Ranny,1996 dalam buku Thoah).Tidaklah mungkin hanya berbicara pada tubuuh pemerintahan dan partai politik saja. Akan tetapi wawasan kebangsaan masyarakat dan budaya masyarakat sangat mempengaruhi, walaupun pada akhirnya pelaksanaan tersebut dilakukan partai politik sebagai pembentuk demokrasi. Masyarakat tentunya mengenal demokrasi melalui pendidikan politik yang dilakukan partai politik.

UU No. 2 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 tentang partai politik mengatakan: "Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". Hal ini merupakan salah satu

fungsi partai politik dalam pendidikan wawasan kebangsaan, selain mengadakan sosialisasi dan pelatihan lainnya. Konsensus dan konflik hal yang pasti ditemui dan paling sering di negara demokratis karena hal yang wajar bagi negara yang majemuk. Akan tetapi baiknya konflik dijadikan sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih cerdas dalam setiap persoalan pemerintahan. Dengan kita melihat konsensus dan konflik yang saling berkaitan maka kita dapat menemukan sistem politik. Menyusun sistem politik jauh lebih mudah dari pada mengubah tingkah laku masyarakat, begitu juga lah yang dirasakan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sistem politik ideal yang ingin di bangun ialah demokrasi Pancasila. Tingkah laku politik masyarakat erat hubungannya dengan kebudayaan politik yang melandasi tingkah laku tersebut juga sangat dipengaruhi pendidikan politik masing-masing masyarakat.

Permasalahan yang ada ketika pendidikan politik tersebut tidak dirasakan masyarakat maka terjadilah pola hidup masyarakat yang instan, bermalas-malasan dan tidak mau tahu tentang negara dan lingkungan bahkan adanya kesenjangan sosial akibat sikap yang materialistis dan pragmatis-opurtunis. Juga dengan pemikiran yang sempit, meningkatnya tingkat pengaguran di daerah tersebut, dikenal dengan istilah batak "*selasa kamis, isi adong isi habis*". Tidak jauh beda halnya budaya politik masyarakat di Kecamatan Ajibata.

Ajibata sendiri merupakan tempat dimana penulis dilahirkan dan dibesarkan, setidaknya memahami bagaimana perkembangan budaya politik masyarakat disana. Melihat geografis dari daerah tersebut sudah selayaknyalah masyarakat disana memiliki budaya politik yang partisipan karena terdapat pada pinggiran Danau Toba yang di kenal seluruh dunia sebagai objek wisata. Akan tetapi penulis kembali melihat dan merasakan masih ada masyarakat yang apatis artinya tidak mau tau terhadap sistem pemerintahan (politik), yang cenderung ikut-ikutan dan bahkan yang paling menyedihkan masyarakat disana memiliki budaya pragmatis-opurtunis yang

mendominasi. Jika tidak ada uang yang mendahului langkah si pemilih atau dikenal istilah “panandaion” (bahasa batak) maka masyarakat lebih baik mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Dan jika mendapat uang lebih dari 1 partai ada saja masyarakat yang gagal dalam memilih misalnya dicoblos semua calon pemimpin.

Di daerah ini juga pelaksanaan demokrasi disalah artikan oleh masyarakat dan elit politik atau orang-orang yang berpengaruh. Misalnya dalam negara demokratis di kenal istilah “*one person one vote*” yang artinya diberikan kebebasan untuk memilih siapa saja, dalam kenyataannya benar menggunakan hak pilih akan tetapi memilih dengan cara harus memilih yang sama atau kedaulatan tidak lagi dimiliki seluruh rakyat akan tetapi sekelompok orang (oligarki/aristokrasi). Jika tidak sama yang dipilih maka akan ada konflik sosial diantara masyarakat. Misalnya si A, B, C dan D merupakan keluarga yang selalu bersama akan tetapi ketika ada pemilihan umum si C memilih yang lain (Menggunakan hak pilihnya sendiri), maka ini akan ketahuan dan dia akan dikucilkan dari kelompok yang tadinya selalu bersama. Ini terjadi disebabkan beberapa faktor misalnya kekeluargaan, ekonomi, dan status sosial.

Ternyata permasalahan juga tidak hanya ada dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi juga ditubuh partai. Misalnya, dominan partai lebih fokus kepada kekuasaan, bukan kepada pendidikan kadernya. Hal ini dibuktikan potret partai politik di Indonesia yaitu pelembagaan politik gerontokrasi dalam internal partai politik. Gerontokrasi merupakan istilah dalam ilmu kedokteran, *Gerontology*, yang menunjukkan suatu fase bagi individu yang memasuki masa tua (Manan, 2008: 18). Artinya keberadaan pemimpin partai politik saat ini dikuasai kaum tua, termasuk PDI-Perjuangan. Mengamati kejadian ini maka akhirnya penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut sehingga menyimpulkan judul penelitian yaitu : **“Pengaruh Pendidikan Politik PDI-P Terhadap Budaya Politik Di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.”**

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan banyaknya penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh partai politik terhadap budaya politik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya politik masyarakat maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi partai politik sebagai lembaga politik di negara demokrasi khususnya di kecamatan Ajibata.
2. Perkembangan Budaya politik masyarakat di kecamatan Ajibata.
3. Budaya masyarakat Ajibata yang pragmatis-opurtunis.
4. Kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Terciptanya masyarakat yang pakum, materialistis dan serba instan.
6. Tingginya tingkat pengangguran di daerah Ajibata akibat gaya hidup yang selasa kamis (*isi adong isi habis*).

C. Pebatasan Masalah

Mengiat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang terjadi agar lebih fokus dan mendalam penelitian dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini difokuskan untuk melihat Fungsi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan/PDI-P di Kecamatan Ajibata.
- 2) Penelitian ini difokuskan untuk melihat Perkembangan budaya politik masyarakatdi kecamatan Ajibata.

- 3) Yang pada akhirnya mengetahui seberapa besar Pengaruh Pendidikan politik PDI-P terhadap budaya politik masyarakat di kecamatan Ajibata

D. Rumusan Masalah

Dari pengidentifikasian masalah di atas, juga mengingat keterbatasan penulis dalam memecahkan masalah satu per satu, maka penulis merumuskan masalah yang terjadi yaitu “Adakah Pengaruh Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) terhadap Budaya Politik Masyarakat di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini dilakukan ialah untuk mengetahui “Pengaruh Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) terhadap Budaya Politik Masyarakat di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir”

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam aspek ilmu sosial dan pendidikan. Tentang pengaruh pendidikan Partai Demokrat Indonesia-Perjuangan terhadap budaya politik masyarakat di Ajibata

2. Secara Praktis

Kajian ini dapat memberi sumbangan kepada pengurus PDI-P dan pengurus partai lainnya. Juga kepada pemerintahan setempat supaya mengetahui budaya politik yang berkembang di daerah tersebut.

3. Secara Rekomendasi

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kepada peneliti yang berminat melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut.

4. Secara Pribadi

Khususnya untuk pribadi penulis tentunya bermanfaat yaitu menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan juga melatih berkomunikasi di lingkungan masyarakat.

